

LAMPIRAN I SURAT KA.BPKPAD

Nomor : 900/0034/BPKPAD-BLG/2025

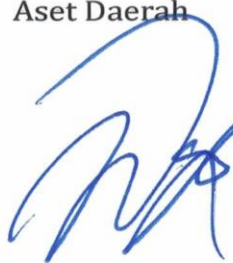
Tanggal : 13 Februari 2024

FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
Sub Urusan	: Perencanaan dan Keuangan
No. IKK	: 4.a.6

**OPINI LAPORAN KEUANGAN
KAB/KOTA BALANGAN
TAHUN 2014 s.d 2023 (10 Tahun Terakhir)**

No.	Tahun	No. Surat	Opini BPK	Keterangan
1	2014	12.C/LHP/XIX.BJM/05/2015	WTP	Wajar Tanpa Pengecualian
2	2015	01.C/LHP/XIX.BJM/05/2016	WTP	Wajar Tanpa Pengecualian
3	2016	13.C/LHP/XIX.BJM/05/2017	WTP	Wajar Tanpa Pengecualian
4	2017	14.C/LHP/XIX.BJM/05/2018	WTP	Wajar Tanpa Pengecualian
5	2018	10.C/LHP/XIX.BJM/05/2019	WTP	Wajar Tanpa Pengecualian
6	2019	12.C/LHP/XIX.BJM/06/2020	WTP	Wajar Tanpa Pengecualian
7	2020	4.B/LHP/XIX.BJM/05/2021	WTP	Wajar Tanpa Pengecualian
8	2021	9.B/LHP/XIX.BJM/5/2022	WTP	Wajar Tanpa Pengecualian
9	2022	12.B/LHP/XIX.BJM/05/2023	WTP	Wajar Tanpa Pengecualian
10	2023	14.B/LHP/XIX.BJM/05/2024	WTP	Wajar Tanpa Pengecualian

Kepala Bidang Akuntansi dan Pertanggungjawaban Badan Pengelolaan Keuangan Pedapatan dan Aset Daerah



Norwanto, SE
NIP. 198303202009041002
Pembina/IV.a

Mengetahui,
Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan
Pedapatan dan Aset
Daerah Kab. Balangan



Fakhriyanto, S.Pt.MP
NIP. 197806012005011016
Pembina Tk I/IV.b

Pembuat Naskah,
Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan
Badan Pengelolaan
Keuangan Pedapatan dan
Aset Daerah



Yuniar Rakhmaina, SKM
NIP.198406062009042008
Penata Tk. I/ III.d

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Balangan tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, dan Realisasi Anggaran, serta Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas

Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Kalimantan Selatan

Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 12.B/LHP/XIX.BJM/05/2015 dan Nomor 12.C/LHP/XIX.BJM/05/2015 Tanggal 25 Mei 2015, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini.

Banjarbaru, 25 Mei 2015
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
 Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan
 Penanggung Jawab Pemeriksaan,

 Subekti, S.E., MM., Ak.
 Akuntan, Registrer Negara No. D-13.936

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Balangan tanggal 31 Desember 2015, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penekanan Suatu Hal

BPK menekankan pada Catatan 7.A.2 atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Balangan bahwa pada TA 2015, Pemerintah Kabupaten Balangan menerapkan akuntansi berbasis akrual pertama kali sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pemerintah Kabupaten Balangan tidak menyajikan kembali Laporan Keuangan Tahun 2014 berbasis Kas Menuju Akrual menjadi Laporan Keuangan Tahun 2014 berbasis akrual. Dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan penerapan akuntansi berbasis akrual disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 01.B/LHP/XIX.BJM/05/2016 dan Nomor 01.C/LHP/XIX.BJM/05/2016 tanggal 27 Mei 2016, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Banjarbaru, 27 Mei 2016
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Provinsi Kalimantan Selatan
Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan,

 Dwi Kencana Dipro, SE., MM., Ak., CA
 Registrer Negara Akuntan Nomor : 9159

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Balangan tanggal 31 Desember 2016, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 13.B/LHP/XIX.BJM/05/2017 dan Nomor 13.C/LHP/XIX.BJM/05/2017 tanggal 26 Mei 2017, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Banjarbaru, 26 Mei 2017
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan
Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan,

 Subirman, S.E., Ak., CA
 Akuntan Registrer Negara Nomor D-16.106

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Balangan tanggal 31 Desember 2017, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 14.B/LHP/XIX.BJM/05/2018 dan Nomor 14.C/LHP/XIX.BJM/05/2018 tanggal 25 Mei 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Banjarbaru, 25 Mei 2018
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan
Penanggung Jawab Pemeriksaan,

 Tormanda Syaifuljab
 Registrer Negara Akuntan No. RNA 17121

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Balangan tanggal 31 Desember 2017, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 14.B/LHP/XIX.BJM/05/2018 dan Nomor 14.C/LHP/XIX.BJM/05/2018 tanggal 25 Mei 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Banjarbaru, 25 Mei 2018
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan
Penanggung Jawab Pemeriksaan,

 Tormanda Syaifuljab
 Registrer Negara Akuntan No. RNA 17121

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Balangan tanggal 31 Desember 2019, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 12.B/LHP/XIX.BJM/06/2020 dan Nomor 12.C/LHP/XIX.BJM/06/2020 tanggal 12 Juni 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Banjarbaru, 12 Juni 2020
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
 Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan
 Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Tornanda Syaifulah, S.E., M.M., Ak., CSFA,
 Register Negara Akuntan No. RNA-17121

WTP 2020


Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Balangan tanggal 31 Desember 2019, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 12.B/LHP/XIX.BJM/06/2020 dan Nomor 12.C/LHP/XIX.BJM/06/2020 tanggal 12 Juni 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Banjarbaru, 12 Juni 2020
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
 Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan
 Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Tornanda Syaifulah, S.E., M.M., Ak., CSFA,
 Register Negara Akuntan No. RNA-17121

WTP 2021

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Balangan tanggal 31 Desember 2021, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 9.B/LHP/XIX.BJM/5/2022 tanggal 13 Mei 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Banjarbaru, 13 Mei 2022

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
 Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan
 Penanggung Jawab Pemeriksaan,



M. Ali Asyhar, S.E., Ak., CA, CSFA
 Register Negara Akuntan No. 4510

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Balangan per 31 Desember 2022, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 12.B/LHP/XIX.BJM/05/2023 tanggal 4 Mei 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.



Banjarbaru, 4 Mei 2023
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan
Penanggung Jawab,

Rahmadi, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA.
Register Negara Akuntan Nomor 8631


WTP 2023

Opini


Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Balangan tanggal 31 Desember 2023, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 14.B/LHP/XIX.BJM/05/2024 tanggal 2 Mei 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.


Banjarbaru, 2 Mei 2024
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan
Penanggung Jawab,

Rahmadi, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA
Register Negara Akuntan Nomor 8631

Kepala Bidang Akuntansi dan Pertanggungjawaban
Badan Pengelolaan Keuangan
Pedapatan dan Aset Daerah



Norwanto, SE
NIP. 198210202009041002
Pembina/IV.a



Mengetahui,
Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan
Pedapatan dan Aset
Daerah Kab. Balangan


Fakhriyanto, S.Pt.MP
NIP. 197806012005011016
Pembina Tk I/IV.b

Pembuat Naskah,
Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan
Badan Pengelolaan Keuangan
Pedapatan dan Aset Daerah


Yuniar Rakhmains, SKM
NIP.198406062009042008
Penata Tk. I/ III.d